

## Tender Kontraktor Becakayu Disiapkan

JAKARTA—PT Kresna Kusuma Dyandra Marga tengah mempersiapkan tender kontraktor Seksi I jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), menyusul pembebasan lahan yang segera mencapai 75%.

Deputi Direktur Utama Kresna Kusuma Dyandra Marga Bambang Hartanto mengatakan setelah pembebasan tanah mencapai 75%, pihaknya segera berkonsultasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengenai tender kontraktor tersebut.

"Saat ini kami tengah mengejar proses pembebasan lahan sambil memulai pengadaan kontraktor yang akan dikonsultasikan dengan BPJT," katanya Rabu (13/3).

Dia mengatakan saat ini belum ada perusahaan jasa konstruksi yang mendekati perusahaan untuk menyatakan minatnya terhadap ruas jalan tol total sepanjang 21,25 km tersebut.

"Pintunya belum kami buka, jadi belum datang. Kami targetkan pada April nanti tender

Seksi	Panjang (Km)	Ruas
I	14,93	Kampung Melayu-Ahmad Yani
II	6,32	Ahmad Yani-Duren Jaya

Sumber: PT Kresna Kusuma Dyandra

sudah bisa dilakukan," ujarnya.

Bambang menyampaikan saat ini perusahaan tengah membebaskan tanah Seksi I sepanjang 14,93 kilometer dari Kampung Melayu-Ahmad Yani. Adapun pembebasan tanah sudah mencapai 72% atau sekitar 10,75 km. Pembangunan Seksi I tersebut, lanjutnya, akan dilakukan secara bertahap mengingat sudah lamanya proyek tersebut terhenti.

"Kami akan prioritaskan 10 kilometer dulu,

dari Cawang sampai Jaka Sampurna karena jika dilihat dari sisi kesiapan lahan ruas tersebut sangat baik, sehingga ada baiknya untuk segera dioperasikan," katanya.

Hingga saat ini, perusahaan sudah menggelontorkan dana Rp71 miliar untuk proses pembebasan lahan jalan tol yang sudah digagas sejak 1998. Adapun biaya dukungan dari pemerintah yakni sebesar Rp350 miliar.

Dia menyampaikan dana dukungan tersebut sudah hampir habis dan diprediksi dapat membebaskan tanah hingga 85%. Setelahnya, perusahaan berencana segera mengajukan dana land capping untuk menyelesaikan pembebasan lahan yang kurang.

"Setelah dana dukungan tersebut habis, dalam waktu dekat kami akan mengajukan land capping kepada pemerintah. Mengenai berapa besarnya kami masih diskusikan dengan P2T [Panitia Pengadaan Tanah] yang bertugas," jelasnya. (Dimas Novita S.)